

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Gender adalah variabel sosial yang digunakan dalam membedakan laki-laki dan perempuan pada kehidupan sosial sehari-hari dalam hal peran, tanggung jawab, kebutuhan, peluang, dan hambatan. Persamaan hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan, pembatasan, dan penghormatan terhadap laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial adalah contoh-contoh kesetaraan gender. Ketidaksetaraan gender adalah setiap diskriminasi berdasar pada jenis kelamin atau kelas lain, seperti suku, warna kulit, agama, dan lain-lain, yang terdapat dalam masyarakat untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan dan perlakuan yang sama.¹

Perspektif tradisional yang menekankan kekuatan negara dan militer tidak lagi mendominasi konsep fundamental seperti keamanan, kekerasan, dan perdamaian dalam studi hubungan internasional kontemporer. Keamanan, perdamaian, dan kekerasan juga memasukkan kekerasan di dalam rumah tangga sebagai sebuah problem. Akibatnya, salah satu topik pembahasan dalam penelitian hubungan internasional adalah kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, karena dapat terjadi di mana saja di dunia, kekerasan terhadap perempuan menjadi isu global. Kekerasan terhadap perempuan saat ini berada pada posisi sebagai diskriminasi serta pelanggaran hak asasi manusia yang berskala global. Kekerasan tradisional dan kriminal dapat melukai perempuan baik dalam masyarakat modern maupun tradisional. Menurut WHO, diperkirakan satu dari lima wanita di belahan dunia sudah merasakan perkosaan atau percobaan perkosaan. Melihat bentuk-bentuk

¹ Haspels, N., & Suriyasarn, B. (2005). Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak.
https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_150508/lang--en/index.htm

kekerasan dan jumlah perempuan yang merasakan kekerasan memberi pandangan kepada kita yang lebih terbuka dan menyeluruh mengenai konsep perdamaian. Nyatanya, tidak ada perang yang pada akhirnya tidak mengakhiri segala bentuk kekerasan. Faktanya, perempuan lebih mungkin meninggal karena kekerasan dalam rumah tangga daripada karena penyakit atau perang, jika tidak lebih. Seperti yang dinyatakan oleh Vlachová dan BIASON (2005), perempuan berusia 15-44 tahun lebih mungkin terluka atau meninggal karena kekerasan laki-laki daripada kanker, kecelakaan lalu lintas, malaria, dan perang.

Pasca perang dunia ke II, salah satu isu yang cukup menarik perhatian adalah isu diskriminasi perempuan dan keprihatinan gender. Dari semua negara yang memiliki ketidaksetaraan gender, India lah yang paling umum mengalami hal tersebut. India merupakan negara yang masih sangat rentan terjadi pelanggaran HAM pada perempuan. Mulai dari kekerasan pada anak perempuan, kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, dan kasus-kasus eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi di India yang juga termasuk dalam diskriminasi gender pada perempuan. Di India, diskriminasi terhadap perempuan ini kerap terjadi dikarenakan perempuan dianggap menjadi kelemahan dalam keluarga. Di India, fenomena dalam pemilihan jenis kelamin sudah terjadi pada tahun 1980-an, yang di mana dominasi dalam mencari pekerjaan atau menghasilkan pekerjaan di kota-kota besar yang ada di India dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat akan merasa jauh lebih kaya ketika mereka memiliki anak laki-laki sebagai ahli waris, sehingga mereka memiliki tekanan untuk lebih memilih jenis kelamin laki-laki dalam memiliki anak. Dasar pemikiran ini yang pada akhirnya memicu diskriminasi pada perempuan dan diskriminasi gender menjadi lebih berat dan besar.²

Alasan utama dalam terjadinya diskriminasi perempuan yang ada di India ini dikarenakan perempuan dianggap memiliki tanggungan yang besar, dukungan fisik dan keuangan yang berkelanjutan bagi anak perempuan, serta system kasta yang ada di India juga menjadi alasan mengapa diskriminasi perempuan di India masih kerap terjadi. Di berbagai bidang lain yang terjadi, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan ini juga menjadi tempat terjadinya diskriminasi gender di India. India memiliki sistem kasta yang mereka pakai dalam sistem sosial mereka. Yang dimana sistem kasta menandakan tinggi atau rendahnya tempat bagi setiap orang India. Kaum yang berada dalam kasta terendah disebut sebagai kasta tetap, atau biasa disebut dengan kaum harijan. Populasi yang dimiliki oleh kaum harijan cukup minoritas di negara bagian lainnya termasuk di India. Kaum harijan ini merupakan kaum yang paling miskin di India. Perempuan yang berasal dari kaum harijan ini memiliki tanggungan diskriminasi paling besar, ini disebabkan oleh kelas, kasta dan yang paling utama adalah gender. Tak sedikit kaum harijan ini tinggal di kawasan pedesaan, kaum perempuan harijan ini menjadi sasaran diskriminasi dan kekerasan seksual yang sah di kawasan pedesaan. Hingga sekarang, tak sedikit kaum perempuan harijan di India masih harus memperlihatkan dada mereka kepada laki-laki yang memiliki kasta lebih tinggi dibandingkan kasta mereka. Ketidaksetaraan gender dan berbasis kasta memiliki banyak pengaruh terhadap kehidupan yang ada di masyarakat India tersisih, termasuk dalam bidang ekonomi. Terutama mereka yang berasal dari pedesaan, yang dimana banyak masyarakat pedesaan banyak kekurangan dalam perekonomian. Mereka memiliki banyak kekurangan, mulai dari tempat tinggal yang kumuh, kekurangan gizi, kemiskinan, pernikahan dini, kurangnya fasilitas belajar yang baik.

- Kesetaraan hak perempuan dalam bidang Politik

Berdasarkan survei terbaru Pew Research Center menunjukkan bahwa lebih dari satu dari setiap dua orang India mengatakan bahwa "perempuan dan laki-laki menjadi pemimpin politik yang sama baiknya" dan lebih dari satu dari setiap sepuluh orang percaya bahwa perempuan pada umumnya menjadi pemimpin politik yang lebih baik daripada laki-laki. Survei dilakukan terhadap 3.000 responden orang dewasa di seluruh negeri bertujuan untuk mengetahui sikap orang India terhadap peran gender. India memiliki politisi perempuan mumpuni, dengan beberapa dari mereka berhasil naik ke posisi politik teratas secara nasional dan regional, termasuk presiden dan perdana menteri. Indira Gandhi, misalnya, perdana menteri perempuan pertama dan satu-satunya di India hingga saat ini, adalah tokoh politik yang dominan di negara itu dari tahun 1966 hingga 1984. Namun, meski penelitian menunjukkan penerimaan publik yang luas terhadap politisi perempuan, partisipasi politik perempuan tetap rendah. Menurut laporan tahun 2020 oleh *Association of Democratic Reforms (ADR)* dan *National Election Watch (NEW)*, kurang dari sepersepuluh dari lebih dari 50.000 kandidat yang mengikuti pemilihan federal dan negara bagian adalah perempuan. India pun merosot 28 posisi ke peringkat 140 di antara 156 negara dalam Laporan Kesenjangan Gender Global Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2021, menjadi negara Asia Selatan ketiga terendah. Sebagian besar penurunan terjadi di bidang pemberdayaan politik, di mana India mengalami kemunduran yang signifikan, dengan penurunan jumlah menteri perempuan dalam beberapa tahun terakhir — dari 23,1% pada tahun 2019 menjadi 9,1% pada 2021.³

- Kesetaraan hak dalam bidang Ekonomi

India lebih diuntungkan dari inklusi ekonomi perempuan daripada negara lain mana pun di dunia, dan pemerintahnya mengakui potensi ini. Baru-baru ini, pemerintah India telah memperkenalkan reformasi ekonomi yang secara eksplisit mempertimbangkan gender, mulai dari cara perempuan

³ <https://www.dw.com/id/mengapa-hanya-sedikit-perempuan-india-terjun-ke-politik/a-61117370>

mengalokasikan waktu mereka hingga cara mereka mengakses pasar dan aset keuangan. Misalnya, pemerintah memberlakukan program perlindungan pekerja yang luas — Undang-Undang Jaminan Ketenagakerjaan Pedesaan Nasional Mahatma Gandhi — yang mensyaratkan upah yang setara untuk pria dan wanita dan mencakup ketentuan untuk pengasuhan anak di tempat kerja. Selain itu, pada bulan Maret 2017 India memberlakukan undang-undang federal yang mengamanatkan bahwa semua pemberi kerja menawarkan cuti melahirkan berbayar selama dua puluh enam minggu.⁴

India juga memimpin dengan kelompok asosiasi tabungan dan kredit, yang dikenal sebagai kelompok swadaya (SHGs), yang mengelola dan meminjamkan akumulasi tabungan kepada anggotanya. SHG ada di seluruh negeri dan terdiri dari kelompok perempuan yang saling meminjamkan. Dengan lebih dari delapan juta kelompok di seluruh India, pemerintah sekarang menggunakan SHG sebagai saluran penyampaian layanan pemerintah yang ditujukan untuk perempuan. Upaya ini dapat didukung oleh inisiatif untuk membantu transisi perempuan dari bekerja di ekonomi informal menjadi memimpin usaha kecil dan menengah, yang telah terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi.⁵

- Kesetaraan hak perempuan dalam bidang pendidikan

Terlepas dari komitmen kuat pemerintah India untuk pendidikan universal, India terus memiliki salah satu tingkat melek huruf perempuan terendah di Asia. Pada tahun 1991, kurang dari 40% dari 330 juta wanita India berusia 7 tahun ke atas mengenyam pendidikan, menyiratkan bahwa lebih dari 200 juta wanita tetap buta huruf saat ini. Tingkat melek huruf yang rendah ini memiliki pengaruh yang parah tidak hanya pada kehidupan perempuan tetapi juga pada kehidupan keluarga mereka dan pertumbuhan ekonomi negara mereka. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa

⁴ <https://www.cfr.org/womens-participation-in-global-economy/case-studies/india/>

⁵ Ibid

perempuan buta huruf memiliki angka kelahiran dan kematian yang tinggi, kondisi gizi yang buruk, kemampuan ekonomi yang terbatas, dan otonomi yang minim di dalam rumah. Kurangnya pengetahuan seorang wanita berdampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan anak-anaknya. Investigasi baru-baru ini di India, misalnya, menemukan bahwa kematian bayi berbanding terbalik dengan tingkat pendidikan ibu. Selain itu, kemajuan ekonomi negara mungkin terhambat oleh kurangnya populasi yang berpendidikan.⁶

Kesenjangan sebenarnya melebar saat kelangsungan hidup meningkat. Harapan hidup saat lahir untuk wanita India (55-57 tahun) menyusul laki-laki (55-54 tahun) untuk pertama kalinya selama 1981-1985, dengan jeda saat ini adalah 3 tahun (70-0 vs 66-69 tahun untuk 2014–2020).⁷ Meskipun keuntungan 3 tahun di tingkat nasional, perempuan dirugikan selama masa kanak-kanak dan seterusnya (terutama remaja) karena untuk diskriminasi yang mengakar dan terus-menerus terhadap anak perempuan. Pada 2014-2020, di India secara keseluruhan, perempuan angka kematian bayi (AKB) melebihi AKB laki-laki sebesar 5%. Namun, angka kematian perempuan di bawah 5 tahun (U5MR) melebihi anak laki-laki sebesar 53% selama periode yang sama. Secara nasional, AKB perempuan menurun dari 67 menjadi 43 per 1000 kelahiran hidup dan AKB laki-laki menurun dari 64 menjadi 41 per 1000 kelahiran hidup antara tahun 2001-2005 dan 2014-2020. Angka yang sesuai untuk U5MR menurun dari 88 sampai 54 per 1000 kelahiran hidup untuk anak laki-laki dan 80 sampai 48 per 1000 kelahiran hidup untuk anak perempuan. Artikel oleh Christophe Guilmoto dan rekan dalam *The Lancet Global Health* adalah upaya yang sangat tepat

⁶ <https://www.collegesearch.in/articles/womens-education#:~:text=According%20to%20the%20survey%2C%20the,overall%20growth%20of%20the%20country.>

⁷ Registrar General of India. SRS based abridged life tables 2014–20. New Delhi: Office of the Registrar General and Census Commissioner, India, Ministry of Home Affairs, Government of India, 2017.

waktu untuk mengulangi nilai perkiraan tingkat kabupaten untuk India, karena statistik nasional dan negara menyembunyikan lebih dari mereka mengungkapkan.⁸

Dikaitkan dengan kekerasan terhadap perempuan atas nama tradisi dan perdamaian yang lebih luas, pembunuhan mahar di India bisa jadi contohnya. Kekerasan terhadap perempuan yang berpotensi menyebabkan kematian perempuan dapat dipicu oleh adat perkawinan yang mewajibkan keluarga mempelai perempuan untuk memberikan mahar kepada keluarga mempelai laki-laki. Saat pemerintah India mengesahkan undang-undang yang melarang pemberian dan penerimaan mahar selama pernikahan yang dikenal sebagai Undang-Undang Larangan Mahar 1961, pembunuhan mahar menjadi fenomena baru di tahun 1980-an. Undang-Undang Larangan Mahar 1961 kemudian diubah dengan 1984 dan 1986 Undang-Undang Pelarangan Mahar berusaha menghapus satu-satunya sistem perkawinan yang disahkan oleh pemerintah kolonial Inggris. Melalui tulisannya di majalah Harijan dan Young India, Mahatma Gandhi telah berjuang keras melawan sistem mahar dalam pernikahan bahkan lebih awal. Gandhi, seorang penganjur perdamaian, mendesak orang India agar menikah yang berdasar pada cinta serta kasih sayang satu sama lain dalam kampanyenya. Gandhi berkata bahwa suatu kekejaman menjadikan pernikahan sebagai syarat untuk memberikan hadiah karena bertentangan dengan gagasan cinta. Pada tiap kampanye yang dia lakukan, Gandhi mengimbuu kelas atas dan kelompok Harijan, dari Bombay hingga desa-desa terpencil di Gujarat, Maharashtra, dan Bengal, untuk berkumpul, kawin campur, dan menikah demi cinta dan niat baik. Meski pemerintah India telah berusaha memberantas praktik perkawinan, sayangnya upaya tersebut belum memberikan hasil yang positif. Kematian wanita di India karena permukiman terus meningkat hingga saat ini. Di India, pernikahan mahar adalah

⁸ CZ Guilamoto, N Saikia, V Tamrakar, JK Bora The Lancet Global Health 6 (6), e650-e658

praktik umum yang jelas berkontribusi pada kekerasan terhadap perempuan dan mengancam kehidupan individu dan kolektif mereka. India adalah negara demokrasi besar yang telah lama bebas dari kolonialisme, perdamaian, dan penindasan; Namun, kebebasan dan kemerdekaan India tidak sepenuhnya mengakhiri penindasan terhadap perempuan. Salah satu syarat perdamaian adalah tradisi filosofis saat ini telah menyebabkan perempuan semakin kehilangan hak asasinya.

Salah satu konvensi hak asasi manusia yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau biasa disebut dengan CEDAW, dibuat dalam memberikan pengentasan diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan. perempuan dalam konteks internasional. Deklarasi Hak-hak Perempuan atau Deklarasi Permanen Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1979, menandai awal berdirinya CEDAW. Rumusan konvensi ini ditetapkan oleh Majelis Umum PBB untuk memecahkan masalah diskriminasi terhadap perempuan, khususnya di negara-negara berkembang. Konvensi tersebut disahkan pada tahun 1981 setelah akses 20 Negara (Kantor Kantor PBB untuk Hak Asasi Manusia. Tujuan adopsi CEDAW adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak perempuan dan mempromosikannya secara internasional, yang akhirnya ditangani oleh United Nations Commission on Women, sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1947 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai dewan deliberatif dan strategis untuk perbaikan hak-hak perempuan. status perempuan. kualitas. dan tempat wanita. Diskriminasi terhadap perempuan sering terdapat pada negara yang berkembang disbanding dengan negara maju, dan India merupakan salah satu negara dengan tingkat diskriminasi yang tinggi. India merupakan negara yang begitu plural. Salah satu sumber adat diskriminasi pada perempuan ialah mas kawin (mahar dalam bahasa Arab atau mahar dalam bahasa Arab atau Indonesia). Orang tua yang mau menikahkan putrinya mesti melakukan pembayaran mahar yang besar pada keluarga mempelai pria, pembayaran ini dilakukan

dalam tradisi agama Hindu. Jika keluarga mempelai wanita merasa tidak bisa membayar mas kawin, mereka seharusnya malu.

Di India, banyak keluarga mempelai pria yang meminta mahar, sehingga sejumlah besar yang melebihi pendapatan keluarga gadis bisa menjadikan mahar sebagai upaya untuk memperkaya diri. Tuntutan mahar ini bisa menyebabkan kekerasan hingga pembunuhan, apalagi keluarga istri tidak bisa memberikan pemenuhan terhadap kemauan suami dan keluarga suami. Kekerasan yang terus menerus terhadap istri bisa menyebabkan istri melakukan bunuh diri, bahkan istri dibunuh oleh suami dan keluarganya, namun terdapat beberapa kasus pembunuhan yang dibuat seolah-olah sebagai tindakan bunuh diri.

Tabel 1. 1 Jumlah kasus kematian Akibat *Dowry* Di India

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kasus	8618	8233	8083	8455	7634

Sumber: National Crime Records Bureau⁹

Berdasarkan data pada Tabel 1, pada tahun 2011 terdapat 8.618 kematian akibat mahar (*Dowry* Akibat protes terhadap berbagai kasus dan kasus diskriminasi terhadap perempuan di India,

⁹ National Crime Records Bureau. (2015). Crime in India 2014: Statistics. [https://ncrb.gov.in/sites/default/files/Statistics/Statistics 2014.pdf](https://ncrb.gov.in/sites/default/files/Statistics/Statistics%202014.pdf)

pemerintah India menanggapi dengan mendeklarasikan diskriminasi dalam CEDAW. Pemerintah India meratifikasi Konvensi CEDAW pada tahun 1993. Women of the United Nations, salah satu organisasi internasional yang terlibat dalam melakukan penanganan kasus-kasus diskriminasi terhadap perempuan di India. Selain Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Wanita, ada organisasi internasional CARE, yang telah membantu orang lain untuk mengakhiri diskriminasi terhadap wanita di India. Pemerintah, LSM dan organisasi internasional di India telah mengambil berbagai langkah untuk mempromosikan kesetaraan bagi anak perempuan di India.

Saat ini, konsep kesetaraan gender sudah tidak asing lagi di dunia. Kesempatan, hak, dan tanggung jawab yang sama bagi laki-laki dan perempuan di semua bidang kehidupan, serta hak untuk menikmati semua manfaat pembangunan, semuanya merupakan contoh kesetaraan gender. Singkatnya, kesetaraan gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan sama-sama menikmati akses yang sama ke semua sumber daya dan kesempatan. Kesetaraan gender perlu diimplementasikan di seluruh dunia sehingga tidak ada perlakuan yang tidak setara atau diskriminasi gender, bahkan di India sekalipun. Menurut survei Bank Dunia, hanya enam negara yang telah mencapai kesetaraan gender penuh, yaitu Belgia, Denmark, Prancis, Latvia, Luksemburg, dan Swedia. Dapat disimpulkan bahwa India belum bisa menempati tingkat kesetaraan gender. Yayasan TomReuters juga memosisikan India sebagai negara paling berbahaya keempat bagi wanita. BBC melaporkan temuan dengan menggunakan indikator pelayanan kesehatan, diskriminasi, budaya tradisional, kekerasan seksual dan non-seksual, serta perdagangan manusia. Melihat situasi ini, bisa diberikan kesimpulan bahwa sangat terpuruknya nasib perempuan India dengan masih jauhnya tingkat kesetaraan gender di India. Banyak hal yang dapat menyebabkan kurangnya kesetaraan gender di India, tetapi tradisi budaya India yang tertanam kuat adalah yang paling signifikan.

Hal ini juga ditegaskan oleh Syed, seorang ahli dari India, dalam bukunya yang berjudul “The Princess is a misfortune”. Bahwa perempuan selalu dianggap sebagai milik laki-laki di India. Wanita dianggap bodoh, dan hanya pria yang dianggap bijaksana. Perempuan tidak berhak menciptakan identitasnya sendiri. Mereka hanya dianggap sebagai istri laki-laki atau tempat untuk memiliki anak¹⁰. Sistem kasta dalam masyarakat India membuat hidup semakin menantang bagi perempuan juga. Di India, pembagian kelas tidak hanya membedakan kelompok tertentu dalam hal status sosial, pendapatan, dan pekerjaan, tetapi juga memberikan peluang penindasan bagi kasta yang lebih tinggi dibandingkan dengan kasta yang lebih rendah. Jelaslah bahwa kendala utama kesetaraan gender di India adalah tradisi budaya. Banyak dari kebiasaan ini sangat berbahaya bagi wanita India. Perempuan tidak akan memiliki hak yang sama dengan laki-laki karena meluasnya diskriminasi yang mereka hadapi.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menentukan topik ini, penulis mengambil identifikasi masalah terkait dengan topik yang akan diteliti suatu konflik yang terjadi di India mengenai diskriminasi perempuan, banyaknya korban kekerasan perempuan yang memberikan tuntutan hak keadilan karena kasus yang terjadi pada mereka serta pelaku kekerasan lainnya yang tidak tertangkap. Penegakan hukum India yang lemah membuat konstitusi tidak benar-benar berlaku untuk rakyat. Pemerintah masih dianggap gagal melindungi hak-hak warga negara. Diskriminasi terhadap kelompok tertentu, khususnya perempuan, juga dilindungi dan dilarang oleh berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang selanjutnya menerapkan hak-hak individu. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination*

¹⁰ Apriani, P., 2015. ‘Kekerasan Seksual di India: Relasi Kuasa Kasta dan Gender’, [Daring] The Global Review. Tersedia dalam <https://theglobal-review.com/kekerasan-seksual-di-india-relasi-kuasa-kasta-dan-gender/>

Against Women (CEDAW)) adalah salah satu dari sekian banyak perjanjian internasional dan instrumen hak asasi manusia yang telah diratifikasi India untuk melindungi hak-hak perempuan.

Dalam konteks hukum hak asasi manusia, hak asasi perempuan, atau hak-hak yang dimiliki seorang perempuan baik sebagai manusia maupun sebagai perempuan, dapat ditemukan dalam berbagai sistem hukum. Sistem ini mencakup berbagai instrumen dan perangkat hukum untuk mewujudkan sistem hukum di tingkat nasional, regional, dan internasional. Ini juga mencakup bagaimana menjamin dan hak akses yang sudah diakui. Misalnya, Konstitusi India tidak hanya menjamin kesetaraan perempuan tetapi juga mendesak pemerintah untuk mencegah segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan untuk menghilangkan kerugian sosial, pendidikan, dan politik yang mereka hadapi. Hak-hak dasar tersebut diantaranya terdiri dari menjamin persamaan di depan hukum dan perlindungan hukum yang sama; menjamin persamaan kesempatan bagi semua warga negara dalam hal ketenagakerjaan dan melarang diskriminasi berdasarkan agama, ras, kasta, jenis kelamin, atau tempat lahir.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini akan dilakukan dengan mengajukan rumusan masalah yaitu Bagaimana upaya Pemerintah India dalam menangani diskriminasi perempuan dan penerapan kesetaraan gender yang dilakukan di India?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana:

1. Untuk mengetahui strategi dalam menyelesaikan permasalahan diskriminasi perempuan di India

2. Untuk mengetahui penerapan kesetaraan gender di India

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritik

Kajian penelitian ini diharapkan penulis mampu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan yang menjadi landasan dan mengevaluasi pengetahuan ini diperoleh saat belajar S1 Hubungan Internasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bagian dari informasi yang lebih luas tentang Upaya India dalam menyelesaikan diskriminasi terhadap perempuan dan mengimpletasikan kesetaraan gender. Manfaat dari penelitian ini diharapkan penulis dapat meningkatkan wawasan dan ilmu, dan manfaat untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai sebuah referensi, sehingga dapat dijadikan sebagai rekomendasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelasnya penelitian skripsi ini, penyusunan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis untuk memperjelaskan tentang suatu latar belakang, rumusan dan tujuan masalah, kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian Skripsi Implementasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Discrimination Against Women) Kasus

Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Penerapan Kesetaraan Gender di India pada tahun 2015-2019.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menelaah dan mensintesa teori dan laporan yang ada, serta memberikan berbagai observasi dan pendapat terkait penelitian yang telah direncanakan.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dan dalam bab ini penulis akan menemukan serta menjelajahi pertanyaan penelitian, penulis akan meneliti berbagai permasalahan dimana yang akan diberikan penyelesaian secara efektif dengan memakai metodologi penelitian yang benar. Disini penulis menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitiannya

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab empat ini peneliti juga menjelaskan serta memaparkan suatu pertanyaan dari bagaimana implementasi CEDAW dalam menangani kasus diskriminasi perempuan dan penerapan kesetaraan gender

BAB V: KESIMPULAN

Pada bagian ini berisi penutup yaitu seperti kesimpulan yang disimpulkan oleh peneliti yang dimana isinya dari hasil penelitian yang ada di dalamnya guna untuk memberikan hasil yang baik terhadap peneliti lainnya yang akan digunakan untuk membahas topik yang sama selanjutnya